

Perbandingan Kebijakan AS Terkait Nuklir Iran: Era George Walker Bush dan Barack Hussein Obama II

Bella Fokker Andini

Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email : bellafokker@gmail.com

Abstract

The Iran's nuclear development draw the intention of The United States of America's President to take action as a form of security. It happens as the nuclear development was being suspected to has a purpose not only for power resource and science, but also might be used as a weapon. This then, the Iran's nuclear development causing concern to the USA which is considered this would threaten their national security and international security. This concern raising because the opinion of Iran would used their nuclear as a Weapon Mass Destruction (WMD) that could kill thousand of people and causing a total damage. It makes the USA to take action in the form of foreign policy making in order to stop the Iran's nuclear development. During the President George Walker Bush's term, the policies that were made were judge to focus on the use of hard power. Meanwhile, during the President Barack Hussein Obama II's term, the policies that were made were considered to tend to use soft power. The difference in policies choice that seen between this two president's term, is influenced by some factors which influence in policy making process.

Kata Kunci: *United States of America, Iran, Nuclear, Threat, Security, Foreign Policy, Factor.*

Program nuklir Iran telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk bagaimana dunia, Amerika Serikat, dan negara-negara kawasan Timur Tengah memandang kepemilikan nuklir tersebut. Pada awalnya, nuklir Iran dikembangkan sebagai bentuk *buffering* yang merupakan bagian dari program inisiasi Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Reza Pahlevi, terhadap pengaruh Uni Soviet di Timur Tengah pada masa Perang Dingin.¹ Saat itu Iran dan Arab Saudi merupakan basis pertahanan dan partner utama

Amerika Serikat. Namun setelah terjadi Revolusi Islam di Iran pada tahun 1979, hubungan kedua negara tersebut menjadi renggang bahkan dapat dikatakan bermusuhan. Sejak saat itu, hubungan Amerika Serikat dan Iran diwarnai dengan ketidaksukaan bahkan adu kekuatan terutama dalam bidang nuklir.

Amerika Serikat menentang penuh upaya-upaya Iran dalam pengembangan nuklir meski mulanya hanya sebatas untuk keperluan sumber energi. Begitupun sebaliknya, Iran juga mengambil sikap oposisi terhadap banyak kebijakan Amerika Serikat utamanya yang berkaitan dengan nuklir. Namun di satu sisi, Iran bersedia untuk menerima kunjungan IAEA yang bertugas mengawasi perkembangan

¹ Naser Hadian dan Shani Hormozi, *Iran's New Security Environment Imperatives: Counter Containment or Engagement with the US*, 2011, 13- 55.

nuklirnya. Meskipun begitu, hal ini tidak lantas membuat Iran menghentikan pengembangan nuklirnya. Terlihat dengan keadaan yang kembali memanas pada tahun 2003 Khatami, Presiden Iran saat itu kembali membuka proyek nuklir Iran dan mengembangkannya secara serius. Meskipun Iran menyatakan bahwa nuklir yang dikembangkan adalah untuk tujuan damai, namun dunia internasional masih tetap mengkritisi aksi Iran tersebut. Kecurigaan Amerika Serikat cukup beralasan karena Iran telah serius dalam mengembangkan misil balistik, yang mana misil balistik tersebut dibeli Iran dari Korea Utara, seperti Scud-B, Scud-C, serta Balistik No-dong. Kesemua misil tersebut digunakan Iran untuk mengembangkan misil Shabab-1, Shabab-2, Shabab-3. Pada tahun 2009, Iran berhasil menguji coba misil yang memiliki daya jangkau sejauh 1500-1800 km yang dapat menjangkau Israel.²

Melihat situasi yang mengancam keamanan internasional ini, George W. Bush sebagai Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, memutuskan untuk melakukan *counter* pada Iran sebagai negara yang memiliki dan mengembangkan nuklir. Menanggapi bentuk ancaman tersebut, Presiden Bush menjalankan strategi kebijakan dengan tindakan koersif atau menggunakan ancaman yang ditujukan secara tidak langsung. Presiden Bush merespon nuklir Iran dengan melakukan penyerangan militer terhadap Irak, yang mana melakukan invasi pada tahun 2003. Invasi militer dilakukan karena permasalahan antara Iran dan Irak memiliki kesamaan, yang mana pada saat itu Irak juga merupakan

negara pengembang *Weapon Mass Destruction* (WMD). Dari sini kemudian, strategi kebijakan ini dipilih karena diharapkan dapat menghentikan aktifitas nuklir baik di Irak maupun Iran. Tidak hanya itu, Iran juga diberikan sanksi oleh Dewan Keamanan PBB yang didalangi oleh Amerika Serikat, berupa empat sanksi ekonomi. Sebagai hasilnya, melihat aksi yang dilakukan Amerika Serikat, pemerintah Iran memutuskan untuk menghentikan aktifitas pengembangan nuklir di negaranya.³

Kemudian dilain sisi, Presiden Barack H. Obama II memiliki respon yang berbeda dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Iran. Apabila pada masa pemerintahan Presiden Bush tidak pernah terjadi komunikasi langsung dengan Presiden Iran, maka hal ini berubah pada masa pemerintahan Presiden Obama. Perubahan diawali melalui pidato Presiden Obama pada acara *Nowruz* tahun 2009, yang memberi ucapan selamat tahun baru kepada Iran. Tidak hanya itu, dalam pidato tersebut Presiden Obama juga menyatakan bahwa "*the United States prefers to resolve this matter peacefully, diplomatically*".⁴ Strategi yang dipilih Presiden Obama dalam menghadapi permasalahan dengan Iran ialah melalui diplomasi dan negosiasi. Dari sini dapat dikatakan bahwa telah ada niatan baik Amerika Serikat untuk

³ Eytan Gilboa dan Efraim Inbar, *US-Israeli Relations in a New Era*, 2009.

⁴ The White House of President Barack Obama, *Statement by President Obama on Nowruz*, <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/03/18/statement-president-obama-nowruz>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2016.

² Aghsan Rahigh dan Peter Viggo Jakobsen. *The Rise of Iran: How Durable, How Dangerous?*, 2010, 559-573.

memperbaiki kerenggangan hubungan dengan Iran.

Selain itu Presiden Obama juga bekerjasama dengan negara-negara sekutu di Eropa, untuk meningkatkan sanksi bagi Iran dengan memberlakukan *Oil Embargo* atau larangan impor minyak dari Iran di tahun 2012. Iran juga dikenakan sanksi lanjutan berupa larangan perdagangan logam mulia emas, berlian dan barang berharga milik badan publik Iran di Eropa, larangan kerja sama dengan Bank, asuransi dan PMA dalam sektor gas dan minyak bumi Iran. Aset pemerintah Iran baik di Amerika Serikat maupun di Eropa juga ikut dibekukan. Deretan sanksi tersebut diharapkan pemerintahan Presiden Obama dapat melemahkan perekonomian Iran sehingga akan memaksanya kembali ke meja perundingan terkait dengan isu nuklirnya.⁵

Selanjutnya setelah meninjau komitmen Iran pada tahun 2015, Presiden Obama memutuskan untuk mengurangi sanksi yang diberikan karena menilai bahwa Iran telah patuh pada kesepakatan pengembangan nuklir.⁶ Hal tersebut memperlihatkan bahwa terdapat kepercayaan yang diberikan Presiden Obama kepada Iran sebagai bentuk kesempatan memperbaiki hubungan. Dalam hal ini jelas terlihat perbedaan pengambilan keputusan antara Presiden Obama dan Bush. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, strategi kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Bush untuk merespon nuklir di Iran ialah dengan melakukan invasi militer ke Irak. Akan tetapi Presiden

⁵ Adirini Pujayanti, *Info Singkat Hubungan Internasional – Sanksi Ekonomi Terhadap Iran dan dampak Internasionalnya*, 2013.

⁶ CBS News, *Iran Nuclear Deal is Done*. <http://www.cbsnews.com/news/us-iran-nuclear-deal-lift-sanctions-enrichment-stockpile-centrifuges/>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2016.

Obama memilih untuk mengeluarkan respon dengan menggunakan diplomasi dan negosiasi tanpa kekuatan militer.⁷

Kepentingan Amerika Serikat di Iran

Penaruhan kepentingan Amerika Serikat di Iran belum dimulai sejak tahun 1953, yang mana Inggris hadir terlebih dahulu dalam melancarkan politik luar negerinya pada tahun 1941.⁸ Kehadiran Inggris di Iran bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya minyak Iran, yang membuat Amerika Serikat juga ikut tertarik pada minyak Iran. Hal ini membuat Amerika Serikat mulai hadir di Iran yang bertujuan mengambil alih kekuasaan Inggris atas Iran. Strategi yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk mengambil alih kekuasaan diawali dengan membangun hubungan kerjasama dengan Iran. Amerika Serikat hadir sebagai pemberi bantuan bagi Iran dalam hal pengembangan militer yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan Reza Pahlevi dan sebagai penangkal atas penyebaran komunis tidak hanya di Iran tetapi juga di kawasan Timur Tengah.⁹

Amerika Serikat menjadikan Iran sebagai sekutunya di kawasan Timur

⁷ Mark P. Lagon, *The Values of Value: Soft power under Obama*. <http://www.worldaffairsjournal.org/article/value-values-soft-power-under-obama>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2016.

⁸ Maryam Y. Yekta Steining, *The United States and Iran: Different Values and Attitudes toward Nature Scratches on Our Hearts and Minds*. https://books.google.co.id/books?id=VNdtln024lcC&printsec=frontcover&dq=iran+before+islami+c+revolution+1979&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=iran%20before%20islamic%20revolution%201979&f=false. Diakses pada tanggal 7 Februari 2017.

⁹ *Ibid*.

Tengah, yang juga ikut serta dalam urusan dalam negeri Iran. Hal tersebut terlihat dengan ikut sertanya Amerika Serikat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sistem agraria. Kebijakan ini lantas merubah secara signifikan terhadap perekonomian di Iran, yang mana menciptakan peningkatan ekonomi dan semangat nasionalisme. Namun di lain sisi, kebijakan ini merupakan strategi Amerika Serikat dalam memecah belah politik para tuan tanah yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris dan ulama senior di Iran.¹⁰

Selanjutnya sekitar tahun 1960an, kerjasama dengan Amerika Serikat menghasilkan keuntungan yang dimanfaatkan oleh Iran dengan mulai mengembangkan teknologi nuklir. Pada tahun 1965 hingga 1975, perekonomian di Iran terjadi peningkatan yang drastis dikarenakan tingginya hasil produksi penjualan minyak. Pemanfaatan keuntungan yang digunakan untuk mengembangkan nuklir oleh Iran didukung oleh Amerika Serikat. Bahkan pada 1974 terbukti terciptanya bentuk kerjasama antara Amerika Serikat dengan Iran pada bidang nuklir, yang mana Amerika Serikat akan memberikan bantuan listrik dan uranium yang telah diperkaya untuk membantu pengembangan teknologi nuklir Iran hingga tahun 1984.¹¹

Bentuk bantuan tersebut dimanfaatkan oleh pihak Amerika Serikat untuk terus memaksa Iran menyalurkan cadangan minyak negaranya untuk kebutuhan Amerika Serikat, Hal ini pada dasarnya dinilai oleh Reza Pahlevi sebagai bentuk permainan kotor, yang mana menggantungkan minyak negaranya sebagai alat untuk mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Tindakan yang dilakukan oleh Reza Pahlevi ini tidak dipungkiri membawa kerugian bagi masyarakat Iran, yang kemudian

membuat masyarakat marah atas tindakan tersebut dan berupaya untuk melakukan protes. Masyarakat beserta ulama besar menggabungkan kekuatan untuk memprotes kepemimpinan Reza Pahlevi yang memberi akses bagi Amerika Serikat untuk mengeksploitasi Iran. Pasalnya, aktifitas kerjasama yang dibentuk antara Iran dengan Amerika Serikat dianggap hanya memberi keuntungan bagi beberapa kelompok saja. Hal ini membuat keadaan dalam negeri Iran tidak stabil dari akhir tahun 1978. Ulama-ulama besar Iran mendalangi masyarakat dan mahasiswa untuk melakukan protes atas ketidakadilan yang dilakukan Reza Pahlevi terhadap rakyat Iran.¹²

Tidak hanya itu, tindakan protes yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa ini didasari oleh beberapa alasan lain yang memperlihatkan buruknya kepemimpinan Reza Pahlevi. Seperti diantaranya mengenai bentuk dan tindakan pemerintahan Reza Pahlevi yang cenderung dilakukan dengan menggunakan penindasan yang sangat kejam, termasuk penganiayaan terhadap anak-anak dan keluarga. Pada masa pemerintahan Reza Pahlevi juga tercatat bahwa tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan pemerintahannya banyak dilakukan. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat miskin Iran, yang mana meskipun negaranya kaya akan hasil minyak akan tetapi masyarakat tetap hidup dibawah garis kemiskinan. Kemudian alasan yang dianggap sebagai masalah utama ialah model

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Fereydoun Hoveyda, *The Shah and The Ayatollah: Iranian Mythology and Islamic Revolution*,

https://books.google.co.id/books?id=QbMgb9pHKIkC&printsec=frontcover&dq=iran+before+islamic+revolution+1979&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=iran%20before%20islamic%20revolution%201979&f=false. Diakses pada tanggal 7 Februari 2017.

pemerintahan yang diadopsi Reza Pahlevi cenderung pada model Barat.¹³

Melihat kepemimpinan Reza Pahlevi yang tidak memuaskan, masyarakat Iran berusaha untuk menggulingkan kekuasaan pemimpin tersebut.

Pemberontakan massa terjadi mulai akhir tahun 1978 dan pada bulan Februari 1979 berhasil memaksa mundur kekuatan Reza Pahlevi dari kursi kepemimpinan Iran. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh Imam Ayatullah Khomeini yang selanjutnya dikenal dengan peristiwa Revolusi Islam Iran. Dampak revolusi tersebut juga berpengaruh pada Amerika Serikat, yang semakin sulit menjalin kedekatan hubungan dengan Iran. Pasalnya, Reza Pahlevi merupakan akses Amerika Serikat untuk menguasai Iran. Setelah kejadian tersebut, berbagai bentuk kebijaksanaan yang pernah terbentuk antara Reza Pahlevi dengan Amerika Serikat dibatalkan oleh Amerika Serikat. Bahkan tidak hanya itu, Amerika Serikat lantas melakukan pembekuan beberapa aset kekayaan Iran yang berada di bank-bank milik negaranya.

Kursi kepemimpinan Iran setelah Khomeini digantikan oleh Hashemi Rafsanjani yang menjabat sebagai Presiden Iran dari tahun 1989 hingga 1997. Pada masa pemerintahan Presiden Rafsanjani ini belum terlihat adanya perbaikan hubungan antara Iran dan Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan kelompok pendukung Presiden Rafsanjani merupakan kelompok konservatif yang menjadi dalang utama terciptanya Revolusi Islam Iran. Sehingga selama pemerintahan Iran dikuasai oleh kelompok ini, pemerintah Amerika Serikat menghadapi kesulitan

untuk menaruh pengaruhnya pada Iran. Tidak hanya itu, dari pihak Iran pun juga memilih untuk tidak berusaha memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat, yang terlihat dengan dibentuknya kebijakan *open door policy* diberlakukan untuk seluruh negara di dunia kecuali Amerika Serikat dan Israel.¹⁴

Presiden Bill Clinton, memiliki tujuan untuk menyebarkan nilai demokrasi di Iran. Sedangkan di sisi lain, Presiden Khatami juga memanfaatkan perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat untuk menciptakan modernisasi di Iran.

Berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Rafsanjani pada tahun 1997, kemudian digantikan oleh Muhammad Khatami yang pada masa kepemimpinannya terjadi perubahan pada hubungan antara Amerika Serikat dan Iran. Amerika Serikat yang pada masa itu dipimpin oleh Presiden Bill Clinton, memiliki tujuan untuk menyebarkan nilai demokrasi di Iran. Sedangkan di sisi lain, Presiden Khatami juga memanfaatkan perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat untuk menciptakan modernisasi di Iran.¹⁵ Hal ini kemudian membuat Amerika Serikat kembali menancapkan pengaruhnya di Iran. Bentuk-bentuk hubungan kerjasama mulai dilakukan antara kedua negara ini dan dinilai membawa perubahan yang baik. Namun pada kenyataannya, meskipun kerjasama yang saling menguntungkan mulai dibangun dan terlihat mulai adanya perbaikan hubungan, semua hal tersebut seakan hanya tampak luarnya saja. Keadaan hubungan antara kedua negara ini dapat dikatakan masih berada pada keadaan yang sama yaitu masih

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Johnatan Marshall et. al., *The Iran Contra Connection, Secret Teams and Covert Operation in the Reagan Era.* http://www.thirdworldtraveler.com/Ronald_Reagan/Irangate-Israel-TICC.html. Diakses pada tanggal 13 April 2017.

¹⁵ *Ibid.*

tertutupnya kesempatan untuk melakukan perdamaian. Hadirnya peran ulama yang cukup besar dalam masyarakat Iran, menjadi penghalang utama keberhasilan perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat.

Keadaan kedua negara ini terus merenggang bahkan hingga terjadinya peristiwa 9/11 yang mendorong Amerika Serikat untuk bersikap tegas pada Iran yang pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Bush. Munculnya isu terorisme menarik kembali terciptanya sentimen Amerika Serikat pada Iran, bahkan memaksa Amerika Serikat untuk bersikap lebih tegas. Hal tersebut terlihat dengan pemilihan kekuatan *hard power* yang dipilih oleh Amerika Serikat untuk mengontrol Iran, yaitu dengan melakukan serangan militer terhadap Irak. Penyerangan Amerika Serikat yang dilakukan di Irak pada dasarnya bertujuan untuk menghentikan terorisme di Irak serta sebagai bentuk gertakan bagi Iran apabila negaranya memberi bantuan pada teroris dan tetap mengembangkan nuklirnya.

Masa pemerintahan di Iran kemudian berganti dari Presiden Khatami menjadi Presiden Mahmoud Ahmadinejad yang dimulai pada tahun 2005. Pada masa pemerintahan Presiden Ahmadinejad ini, hubungan kedua negara tetap terlihat renggang. Bahkan dengan adanya sentimen Presiden Bush pada Iran yang menyatakan bahwa Iran sebagai salah satu negara poros setan, membuat isu terorisme dan nuklir Iran menjadi suatu ancaman bagi Amerika Serikat. Hal ini mendorong Amerika Serikat melakukan pengawasan terhadap Iran dan berhasil menemukan adanya aktifitas instalasi program nuklir di Natanz yang melakukan adanya pengembangan reaktor *heavy water* yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuat senjata nuklir.¹⁶ Respon Iran

¹⁶ BBC, *Iran's Key Nuclear Site*. <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-11927720>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2016.

dalam penemuan tersebut ialah tidak membenarkan informasi yang menyatakan bahwa negara sedang melakukan pengembangan nuklir yang akan digunakan sebagai senjata. Iran melakukan klarifikasi bahwa pengembangan nuklir yang dilakukan negaranya bertujuan untuk tujuan damai dan pembangkit energi. Dari sini kemudian menarik perhatian organisasi atom internasional IAEA untuk melakukan pemeriksaan pada program nuklir Iran, dan setelah dilakukan pemeriksaan tidak terbukti bahwa nuklir yang dikembangkan oleh Iran ditujukan sebagai senjata.

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Iran Pada Masa Bush dan Obama

Pada masa kepemimpinan Bush, keamanan nasional Amerika Serikat sedang berada pada keadaan terancam, yang mana terjadi peristiwa penyerangan teroris 9/11. Peristiwa tersebut membuat Presiden Bush meningkatkan keamanan negaranya, serta menyatakan perang pada segala bentuk terorisme. Presiden Bush pun melabelkan Iran sebagai negara yang dikategorikan sebagai *Rogue State* atau dapat diartikan sebagai negara menyimpang yang tidak mematuhi aturan dan hukum internasional.¹⁷ Negara yang dikategorikan sebagai negara menyimpang ini ialah yang memiliki senjata pemusnah massal dan teknologi militer yang digunakan untuk mengancam negara lain, mendanai kegiatan terorisme, mengabaikan hukum internasional, mengancam negara-negara di sekitarnya dan menolak implementasi dan penghargaan nilai-nilai kemanusiaan dan memperlihatkan sikap bermusuhan dengan Amerika Serikat. Hal ini membuat Presiden Bush menilai Iran

¹⁷ Christopher Preble, *The Bush Doctrine and "Rogue" States*, https://object.cato.org/sites/cato.org/files/articles/preble_afsa_bush_doctrine_rogue_states.pdf. Diakses pada tanggal 17 Maret 2017.

sebagai ancaman bagi keamanan negara dan menolak pengembangan nuklir yang dilakukan. Pasalnya, Amerika Serikat memiliki kekhawatiran bahwa teknologi nuklir dapat membuat Iran dapat menguasai negara-negara di kawasan Timur Tengah dan membuat Amerika Serikat kehilangan pengaruh. Selain itu, juga dikhawatirkan adanya monopoli dan manipulasi harga minyak oleh Iran.¹⁸

Setelah terjadinya peristiwa terorisme 9/11, dibawah kepemimpinan Presiden Bush semakin menunjukkan kapabilitasnya sebagai negara adidaya. Presiden Bush mengeluarkan doktrinnya yang dikenal dengan sebutan Doktrin Bush yang dikeluarkan pada tahun 2002, yang menyatakan perang terhadap terorisme. Presiden Bush juga menyatakan pada pidato kenegaraan bahwa Iran beserta Korea Utara dan Irak sebagai negara poros setan mengancam keamanan dunia. Sikap Amerika Serikat yang sentimen terhadap pengembangan nuklir Iran pun didasari oleh beberapa faktor seperti, Iran tidak dapat melakukan transparansi atas pengembangan program nuklirnya. Amerika Serikat hanya menginginkan Iran dapat membuktikan bahwa program nuklir yang dikembangkan bertujuan untuk kepentingan damai dan pendidikan. Amerika Serikat juga meyakini bahwa pemerintahan Iran merupakan pendukung dari kelompok-kelompok teroris, yang apabila Iran memiliki nuklir maka dikhawatirkan akan didistribusikan kepada kelompok-kelompok tersebut. Dari sini membuat kekhawatiran munculnya *nuclear terrorist* yang dinilai sebagai ancaman yang melebihi Al-Qaeda. Teroris nuklir dianggap sebagai ancaman besar bagi keamanan Amerika Serikat, karena dengan nuklir yang merupakan senjata pembunuh massal, dapat

disalahgunakan oleh teroris dengan kepemilikan nuklir dapat menyerang manusia dalam jumlah banyak dan menyebabkan kerusakan fatal. Oleh karena itu sebagai bentuk keamanan, Presiden Bush membuat strategi kebijakan dengan melakukan *counter* pada negara-negara yang memiliki dan mengembangkan nuklir.¹⁹

Presiden Bush memberikan pilihan kepada Iran, yaitu untuk melakukan transparansi atas pengembangan nuklirnya dan sebagai gantinya, Iran akan mendapatkan keuntungan diplomatik, ekonomi, dan keamanan.

Dalam rangka menangani permasalahan nuklir Iran, Presiden Bush pada awalnya mencoba dengan strategi halus tanpa ancaman, yaitu dengan melakukan negosiasi langsung ataupun dengan adanya perantara perundingan-perundingan baik secara langsung antara kedua pihak maupun melalui perantara. Presiden Bush memutuskan untuk membentuk kerjasama dengan negara-negara lain untuk memaksa Iran melakukan transparansi dan menghentikan pengembangan nuklirnya. Presiden Bush memberikan pilihan kepada Iran, yaitu untuk melakukan transparansi atas pengembangan nuklirnya dan sebagai gantinya, Iran akan mendapatkan keuntungan diplomatik, ekonomi, dan keamanan. Kelonggaran pada sanksi ekonomi juga menjadi salah satu keuntungan yang akan diperoleh oleh Iran apabila menyepakati pilihan tersebut. Amerika Serikat juga menjanjikan terciptanya dukungan internasional akan program nuklir jika dikembangkan untuk tujuan damai dan pendidikan. Namun apabila tidak mengambil pilihan tersebut, maka Iran akan dikenakan hukuman sanksi yang lebih berat.²⁰

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ The Iran Primer, *The George W. Bush Administration*.
<http://iranprimer.usip.org/resource/george-w->

Kemudian pada tahun 2003, Iran menyatakan akan mematuhi dan bekerjasama penuh dengan IAEA, serta memutuskan untuk menghentikan aktivitas pengayaan uranium. Tidak hanya itu, Iran juga sepakat untuk mengadopsi protokol IAEA yang mana memberikan akses pada organisasi tersebut terhadap kegiatan pengembangan nuklirnya. Pernyataan kesepakatan tersebut dikuatkan dalam Paris Agreement yang ditandatangani pada November 2004, setelah setahun lamanya berusaha membuat Iran untuk patuh. Hal ini membuat Amerika Serikat menaruh kepercayaan kepada Iran dengan melupakan ketidakelegannya atas keanggotaan Iran di World Trade Organization dan memberikan perizinan penuaan *spare part* pesawat terbang bagi pesawat terbang sipil milik Iran.²¹

Namun kepatuhan yang dijanjikan oleh Iran tidak berlangsung lama, yang mana pada tahun 2006 Iran kembali melakukan aktivitas pengayaan uranium di Natanz. Hal ini tentu menarik kembali perhatian Amerika Serikat, yang kemudian Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice mengumumkan bahwa negaranya akan bergabung dengan the EU-3 (Inggris, Perancis, Jerman) dalam melakukan pembicaraan mengenai penghentian aktivitas pengembangan nuklir. Tidak hanya itu, the P5+1 (Inggris, China, Perancis, Rusia, dan Amerika Serikat - ditambah Jerman) juga memberikan pilihan tambahan kepada Iran untuk menghentikan program nuklirnya. Ketua kebijakan luar negeri EU, Javier Solana, melakukan beberapa kali pertemuan dengan negosiator nuklir Iran, Ali Larijani, namun setiap kali terlihat adanya kemajuan, Presiden Ahmadinejad menolak dan menyerang proses tersebut. Hingga pada akhirnya negosiasi tidak menghasilkan hasil yang memuaskan bahkan pada tahun 2007,

[bush-administration](#). Diakses pada tanggal 22 April 2017.

²¹ *Ibid.*

Larijani mengundurkan diri karena tetap tidak mendapatkan solusi.²² Hal serupa juga terjadi pada upaya yang telah dilakukan P5+1 yang tetap tidak membuahkan hasil.

Melihat tidak adanya solusi yang diperoleh, membuat Iran semakin berani mengembangkan nuklirnya. Dari sini membuat Amerika Serikat terus berupaya mencari dukungan dari internasional untuk menghukum Iran. Setelah berhasil mencari dukungan internasional, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa sebagai sekutu menjatuhkan hukuman kepada Iran berupa sanksi misil Iran dan yang terkait nuklir, pembekuan aset dan larangan berpergian, dan menciptakan kewaspadaan internasional terkait perdagangan senjata dengan Iran.²³ Secara terpisah, Amerika Serikat juga memberikan hukuman kepada Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) dan bank-bank milik Iran. Lebih lanjut Amerika Serikat juga mempengaruhi negara lain untuk menghentikan melakukan bisnis dengan Iran. Hal ini dilakukan karena Amerika Serikat mempercayai bahwa aktivitas pendanaan dan bisnis dengan bank-bank milik Iran, juga berkaitan dengan aktivitas memfasilitasi pengembangan nuklir, mendukung terorisme, dan melakukan pencucian uang. Lebih dari 90 bank internasional di seluruh dunia mengikuti jejak Amerika Serikat. Adanya sanksi ekonomi dan pembatasan bank-bank menyebabkan sejumlah perusahaan multinasional di Iran membatalkan kontrak yang telah disepakati.

Kemudian masa pemerintahan berlanjut menuju kepemimpinan Presiden Obama yang pada awal kampanye saat mencalonkan diri sebagai presiden, menjanjikan akan membawa perubahan dalam membangun hubungan dengan Iran. Hal tersebut dibuktikan dengan

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

tindakan yang dilakukan Presiden Obama setelah terpilih menjadi presiden ialah mengucapkan selamat tahun baru kepada Iran. Tidak hanya itu, Presiden Obama juga menyatakan dalam pidatonya pada tahun 2009 di Prague bahwa dalam rangka sebagai usaha mencari solusi permasalahan nuklir Iran, Presiden Obama akan melakukan pendekatan berdasarkan kepentingan bersama.²⁴

Di bawah kepemimpinan Presiden Obama pun mulai terlihat adanya perubahan fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yang mana pada masa pemerintahan sebelumnya berfokus pada aspek militer, maka menjadi berfokus pada aspek perdamaian jangka panjang dalam melakukan hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Pada masa pemerintahannya, Presiden Obama mulai membuka dan memperbaiki hubungan dengan negara-negara muslim, melakukan peningkatan kerjasama ekonomi, pendidikan, sosial, serta budaya.²⁵ Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Obama berusaha melakukan kerjasama di segala bidang dalam menjalin hubungan luar negerinya dengan negara-negara lain. Hal ini dilakukan karena Presiden Obama ingin menghapuskan citra buruk Amerika Serikat di mata internasional, setelah melakukan agresi militer ke Irak tahun 2003.

Pada masa pemerintahannya selanjutnya terhadap nuklir Iran, Presiden Obama memilih strategi kebijakan dengan memperketat sanksi yang diberikan kepada Iran, diantaranya mengeluarkan perluasan pembatasan finansial Iran untuk melakukan bisnis dengan negara maju, langkah-langkah

yang menargetkan pelaku pelanggaran hak asasi manusia ditambahkan, dan menyatakan bahwa negara yang tetap melanjutkan bisnis dengan Iran akan mendapatkan resiko dari dunia internasional.²⁶ Presiden Obama juga menandatangani sanksi, akuntabilitas, dan tindakan pencabutan yang komprehensif terhadap Iran sebagai bentuk upaya pelarangan akan perdagangan produk petroleum ke Iran.

Pada masa pemerintahannya, Presiden Obama mulai membuka dan memperbaiki hubungan dengan negara-negara muslim, melakukan peningkatan kerjasama ekonomi, pendidikan, sosial, serta budaya

Selain sanksi, pemerintah Amerika Serikat melancarkan beberapa ancaman dalam rangka mencegah program pengembangan nuklir Iran salah satunya melalui virus komputer Stuxnet yang mampu melumpuhkan program nuklir dan menggagalkan serangkaian pembunuhan ilmuwan nuklir Iran secara sementara. Meskipun penekanan seperti itu telah ditekankan pada Iran, pemerintah Amerika Serikat tetap melakukan penjangkauan terhadap masyarakat Iran. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pembicara dengan bahasa Persia pertama yang ada di Departemen dalam negeri, mengimplementasikan program yang berupaya untuk memperluas cakupan akses masyarakat Iran atas informasi dan teknologi, dan memberikan visa beberapa kali masuk kepada pelajar Iran yang bertujuan menimba ilmu di Amerika Serikat.²⁷

Namun lagi-lagi usaha yang dilakukan Amerika Serikat tidak juga membuat Iran menghentikan program nuklirnya. Sehingga sejak akhir tahun 2009-2013, hubungan antara Amerika Serikat dan Iran berada pada keadaan buntu. Hingga pada Juni 2013, Hassan Rouhani

²⁴ Mark. Op. Cit.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

terpilih menjadi Presiden Iran yang dinilai sebagai pemimpin yang lebih moderat dan pragmatis, mulai terlihat kembali adanya upaya perbaikan hubungan. Setelah diinagurasi, Presiden Rouhani membuka dialog dan negosiasi dengan negara-negara Barat terkait program nuklir Iran. Pada September 2013, Presiden Obama dan Rouhani melakukan percakapan melalui telepon, yang menjadikan adanya hubungan langsung antara pemimpin Amerika Serikat dan Iran sejak tahun 1979.²⁸ Dalam percakapan tersebut, keduanya mulai membangun kerjasama dan negosiasi.

Dari situ kemudian pada November 2013, terbentuk kesepakatan program nuklir Iran yang terdiri atas Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, China, EU, dan Iran. Kesepakatan tersebut dikenal dengan *Joint Plan of Action* (JPOA) yang ditandatangani di Jenewa. Kesepakatan tersebut berisi tentang pengurangan aktivitas pengembangan nuklir Iran dan sebagai gantinya berupa pengurangan sanksi ekonomi bagi Iran. Kesepakatan ini mulai aktif dijalankan oleh Iran pada awal tahun 2014. Kemudian sejak saat itu, dialog tetap dilakukan dalam rangka mencapai solusi jangka panjang. Hingga pada akhirnya kesepakatan baru ditetapkan pada Juli 2015 yang dikenal sebagai *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA).²⁹ Pemerintahan pada masa Presiden Obama mengimplementasikan bentuk sanksi *snap-back*, yang mana akan terdapat kerugian apabila Iran melanggar dan tidak mematuhi sanksi.

Dibawah kesepakatan ini, Iran menyepakati untuk membatasi program nuklirnya diantaranya ialah pertama, akan menurunkan *stockpile* uranium

berkandungan rendah sebesar 98 persen. Hal tersebut disepakati untuk dijalankan selama 15 tahun. Kedua, Iran akan mengganti dua per tiga cadangannya dan hanya mengembangkan aktifitas di Natanz saja. Kesepakatan ini akan dijalankan selama sepuluh tahun. Ketiga, Iran bersedia untuk menahan diri dari pembangunan segala bentuk peningkatan fasilitas uranium selama 15 tahun. Keempat, Iran sepakat untuk mengurangi aktifitas peningkatan uranium di Fordow dan menjadikan sebagai pusat fisik nuklir dan teknologi selama 15 tahun. Kelima, Iran akan mengimplementasi kesepakatan protokol tambahan yang akan terus berlanjut selama menjadi anggota dari Nuclear Non-Proliferation Treaty. Keenam, Iran bersedia dilakukan inspeksi dan pengecekan yang dilakukan oleh IAEA. Ketujuh, kesepakatan ini berisi prosedur penyelesaian masalah apabila sewaktu-waktu Iran tidak mematuhi kesepakatan.³⁰

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Nuklir Iran

Melalui analisis yang dilakukan dalam tulisan ini, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap nuklir Iran diantaranya ialah faktor individu, kelompok, dan dalam negeri Iran. Pertama, faktor individu dianggap mempengaruhi proses pembuatan kebijakan karena Presiden Bush dan Obama memiliki karakteristik berbeda yang mana keduanya memiliki kepribadian masing-masing. Kepribadian pada diri kedua presiden ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, serta pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kepribadian tersebut dalam proses pembuatan kebijakan, tidak jarang mempengaruhi terbentuknya suatu

²⁸ Milena Sterio, *President Obama's Legacy: The Iran Nuclear Agreement?* <http://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2236&context=jil>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2017.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

kebijakan.³¹ Sehingga perbedaan karakteristik ini dapat terlihat melalui kebijakan-kebijakan luar negeri yang diimplementasi oleh Amerika Serikat dalam menghadapi permasalahan internasional. Perbedaan terlihat dalam bagaimana Amerika Serikat berupaya untuk menerapkan sikap yang berbeda pada masa pemerintahan Presiden Bush dan Obama. Hal tersebut dikarenakan kedua presiden memiliki fokus dan kepentingan yang berbeda. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Presiden Bush cenderung berfokus pada hal terciptanya keamanan, sehingga dalam menerapkan hukuman atas nuklir Iran ialah dengan ancaman militer dan sanksi ekonomi. Sedangkan dilain pihak, Presiden Obama lebih berfokus pada hal terciptanya perdamaian jangka panjang, sehingga solusi yang dijalankan ialah melalui dialog dan negosiasi damai.

Faktor selanjutnya ialah hadirnya kelompok pemikir yang memberikan informasi kepada presiden sehingga mempengaruhi pemilihan kebijakan yang dipilih presiden dalam membuat kebijakan. Salah satu kelompok yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan Amerika Serikat ialah kelompok Neo-Konservatif, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Bush yang dipengaruhi oleh kelompok ini. Arah fokus kebijakan luar negeri kelompok ini ialah unilateralis yang memiliki kepentingan yang hendak dicapai berupa mempertahankan kekuatan Amerika Serikat di setiap negara melalui cara apapun. Pada masa pemerintahan Presiden Bush, kelompok Neo-konservatif memiliki peran yang cukup signifikan, yang mana mempengaruhi fokus arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hal

³¹ Marijke Breuning, *Foreign Policy Analysis : A Comparative Introduction*, 2007.

Berasal dari partai yang berbeda, Presiden Obama dalam proses pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh kelompok Liberal yang berasal dari partai politiknya. Nilai-nilai Liberal diadopsi sebagai titik tumpu kebijakan yang dibuat oleh Presiden Obama

tersebut disebabkan oleh partai politik Presiden Bush yaitu Partai Republik, merupakan partai yang di dominasi oleh kelompok Neo-Konservatif. Keadaan ini lantas membuat berbagai bentuk kebijakan yang dibuat oleh Presiden Bush berasal dari proses perundingan kelompok Neo-konservatif. Sehingga tidak dapat dipungkiri apabila kebijakan yang dibuat cenderung mengarah pada pencapaian kepentingan yang sejalan dengan kepentingan kelompok.³² Sikap unilateralisme yang diadopsi kelompok Neo-konservatif memperlihatkan bahwa pandangan realis digunakan sebagai panduan dalam mencapai kepentingan kelompok. Hal ini terbukti dari dipilihnya kebijakan-kebijakan yang berlandaskan pada menjaga keamanan nasional, tanpa melihat keadaan internasional.

Dapat dikatakan bahwa dibawah dominasi kelompok Neo-konservatif, Amerika Serikat akan terus melakukan pertahanan negara dengan memanfaatkan kekuatan militer.³³

Berasal dari partai yang berbeda, Presiden Obama dalam proses pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh kelompok Liberal yang berasal dari partai politiknya. Nilai-nilai Liberal diadopsi sebagai titik tumpu kebijakan yang dibuat oleh Presiden Obama. Berbanding terbalik dengan kelompok Neo-konservatif, kelompok Liberal menjunjung tinggi multilateralisme dan institusi internasional. Kerjasama internasional dan membangun koalisi

³² Johnatan. Op. Cit.

³³ Dewi Fortuna Anwar, *Tatanan Dunia Baru Dibawah Hegemoni Amerika Serikat*, 2003, 7-28.

menjadi kunci utama Presiden Obama dalam memilih pendekatan terhadap Iran. Tidak hanya itu, Presiden Obama cenderung mencari solusi selain militer, yang mana mengedepankan solusi dalam bentuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga perubahan iklim. Tradisi liberal yang diadopsi oleh Presiden Obama ialah memandang bahwa setiap negara akan membentuk kerjasama apabila terdapat niat baik dan kepercayaan antara satu sama lain. Hal ini diimplementasikan dalam menjalin hubungan dengan negara menyimpang, salah satunya Iran, yang mana Presiden Obama melakukan keterbukaan dan dialog dengan Iran. Presiden Obama berusaha menanamkan adanya niat baik dari Amerika Serikat yang akan membuat Iran merubah persepsinya dan kemudian akan merubah kebijakannya dengan mau melakukan negosiasi untuk menghentikan program nuklirnya.³⁴

Faktor terakhir kemudian berasal dari kepemilikan minyak Iran yang menjadi faktor dalam negeri Iran dan menjadi daya tarik bagi Amerika Serikat. Sehingga dalam pembuatan kebijakan terkait Iran, proses pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dipengaruhi oleh keberadaan minyak Iran. Kepentingan nasional yang hendak di capai oleh Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah tidak terlepas dengan keinginannya untuk menguasai minyak di kawasan tersebut. Amerika Serikat bahkan menaruh kepentingan utama di negara-negara kawasan, yang mana berupa ketergantungan atas bahan bakar minyak. Keberadaan minyak sebagai sumber daya bagi Iran mempengaruhi pembuatan kebijakan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Bush dengan memberikan sanksi perdagangan minyak Iran. Tidak hanya itu, pada masa pemerintahan Obama, minyak Iran juga menjadi faktor yang

mempengaruhi pembuatan kebijakan Amerika Serikat. Pada masa pemerintahan kedua presiden terlihat adanya persamaan dalam melihat minyak Iran sebagai kekuatan dan kelemahan bagi Iran. Produksi dan penjualan minyak menjadi sumber pendapatan utama Iran yang apabila terdapat gangguan dalam proses penjualan minyak, maka ekonomi Iran dapat mengalami ketidakstabilan. Hal ini kemudian terlihat sama-sama dimanfaatkan oleh pemerintahan kedua presiden, yang mana sama-sama menjatuhkan sanksi embargo minyak.³⁵

Simpulan

Dari penjelasan diatas kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk perbandingan kebijakan luar negeri yang dipilih pada masa pemerintahan Presiden Bush dan Obama, terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaan terlihat dari strategi kebijakan yang dipilih kedua presiden yang dipengaruhi oleh faktor individu. Terjadi perubahan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran terjadi dalam tingkatan individual, dimana hal yang mempengaruhi adanya perbedaan pendekatan tersebut ialah pribadi masing-masing pemimpin dalam merespon tantangan pembuatan kebijakan luar negerinya. Berdasarkan faktor individu, Presiden Bush dinilai memiliki kepribadian yang koersif, berbicara langsung pada tujuannya dan agresif. Sedangkan dilain pihak, Presiden Obama merupakan pribadi yang terbuka, tidak menyukai konfrontasi, dan mengedepankan perdamaian. Tidak hanya itu, sejak awal pemerintahan Presiden Obama telah melakukan upaya perbaikan hubungan dengan Iran. Dari sini kemudian dapat dikatakan bahwa terdapatnya perbedaan dalam kebijakan Amerika Serikat yang

³⁴ Robert Ondrejcsak, *American Foreign and Security Policy under Barack Obama: change and continuity*, 2009, 147-162.

³⁵ CBS News, *Obama Moves Ahead with Iran Oil Sanction*, <http://www.cbsnews.com/news/obama-moves-ahead-with-iran-oil-sanctions/>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2017.

dipilih pada masa pemerintahan kedua presiden terkait Iran, dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin. Dalam hal ini, kepribadian seorang presiden yang berasal dari latar belakang kehidupannya, memiliki peran dalam mempengaruhi pandangan dan keputusan presiden tersebut dalam membuat suatu kebijakan. Setiap presiden tentu memiliki nilai yang diadopsi, kepercayaan yang diyakini, serta keinginan pribadi masing-masing yang hendak dicapai, hal-hal tersebut lah yang dianggap sebagai pembentuk kepribadian individu dan menjadi aspek yang mempengaruhi dalam proses pembuatan kebijakan.

Kemudian, bentuk perbandingan kebijakan pada masa kedua presiden juga memperlihatkan adanya persamaan yang dipengaruhi oleh faktor kelompok yang berada di sekitar pembuat kebijakan. Dalam hal ini, sumber pemerintah yang berupa kelompok pemikir, cenderung lebih memilih cara koersif seperti pemberian hukuman dan ancaman. Kelompok yang mempengaruhi pembuatan kebijakan pada masa pemerintahan Presiden Bush ialah kelompok Neo-konservatif yang berasal dari Partai Republik. Kelompok ini sangat menjunjung tinggi terciptanya keamanan nasional melalui cara apapun, sehingga membuat Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Bush cenderung berorientasi pada kekuatan militer. Sedangkan pada

masa pemerintahan Presiden Obama, pembuatan kebijakan Amerika Serikat dipengaruhi oleh kelompok liberal yang berasal dari Partai Demokrat. Meskipun nilai yang diadopsi oleh kelompok ini berlandaskan pada terciptanya perdamaian, tetapi kebijakan yang dihasilkan dari perundingan kelompok ini juga berbentuk ancaman. Namun perlu diperhatikan bahwa meskipun berupa ancaman, akan tetapi ancaman yang diberikan tidak pada aspek militer, melainkan aspek non-militer. Sehingga kebijakan yang dibuat oleh Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Obama cenderung berupa sanksi ekonomi, ancaman diplomatik, dan ancaman virus komputer.

Selanjutnya penulis juga menemukan bahwa terdapat faktor domestik Iran yang ikut mempengaruhi proses pembuatan kebijakan Amerika Serikat terkait Iran. Keberadaan minyak Iran membuat Amerika Serikat memanfaatkannya untuk membuat Iran patuh pada kesepakatan-kesepakatan internasional. Dalam hal ini, Amerika Serikat di masa kedua presiden sama-sama mengeluarkan kebijakan terkait nuklir Iran berupa penjatuhan sanksi ekonomi serta pembatasan perdagangan minyak Iran. Sanksi tersebut dinilai kedua pemerintahan sebagai bentuk ancaman bagi stabilitas dalam negeri Iran, yang nantinya diharapkan dapat membuat negara ini patuh pada aturan-aturan internasional.

Daftar Pustaka

- [1] BBC. 2002. *Iran's Key Nuclear Site* [online] tersedia di <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-11927720>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2016.
- [2] CBS News. 2016. *Iran Nuclear Deal is Done* [online] tersedia di <http://www.cbsnews.com/news/us-iran-nuclear-deal-lift-sanctions-enrichment-stockpile-centrifuges/>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2016.
- [3] _____. 2012. *Obama Moves Ahead with Iran Oil Sanction* [online] tersedia di <http://www.cbsnews.com/news/obama-moves-ahead-with-iran-oil-sanctions/>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2017.
- [4] Hoveyda, Fereydoun. 2003. *The Shah and The Ayatollah: Iranian Mythology and Islamic Revolution* [online] tersedia di https://books.google.co.id/books?id=QbMgb9pHKIkC&printsec=frontcover&dq=iran+before+islamic+revolution+1979&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=iran%20before%20islamic%20revolution%201979&f=false. Diakses pada tanggal 7 Februari 2017.
- [5] Logan, Mark P. 2015. *The Values of Value: Soft power under Obama* [online] tersedia di <http://www.worldaffairsjournal.org/article/value-values-soft-power-under-obama>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2016.
- [6] Marshall, Johnatan et. al. 1999. *The Iran Contra Connection, Secret Teams and Covert Operation in the Reagan Era* [online] tersedia di <http://www.thirdworldtraveler.com/Ronald>

- [_Reagan/Irangate_Israel_TICC.html](#). Diakses pada tanggal 13 April 2017.
- [7] Preble, Christopher, 2005. *The Bush Doctrine and "Rogue" States* [online] tersedia di https://object.cato.org/sites/cato.org/files/objects/publications/2005-03-17/2005-03-17_preble_afsa_bush_doctrine_rogue_states.pdf. Diakses pada tanggal 17 Maret 2017.
- [8] Steininger, Maryam Y. Y. 2010. *The United States and Iran: Different Values and Attitudes toward Nature Scratches on Our Hearts and Minds* [online] tersedia di https://books.google.co.id/books?id=VNdtln024lcC&printsec=frontcover&dq=iran+before+islamic+revolution+1979&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=iran%20before%20islamic%20revolution%201979&f=false. Diakses pada tanggal 7 Februari 2017.
- [9] Anwar, Dewi Fortuna, 2003. *Tatanan Dunia Baru Dibawah Hegemoni Amerika Serikat*. hal 7-28.
- [10] Breuning, Marijke. 2007. *Foreign Policy Analysis : A Comparative Introduction*. (New York: Plagrave Macmillan).
- [11] Gilboa, Eytan dan Efraim Inbar. 2009. *US-Israeli Relations in a New Era*. New York: Routledge.
- [12] Hadian, Naser dan Shani, Hormozi. 2011. "Iran's New Security Environment Imperatives: Counfer Containment or Engagement with the US, dalam *Iranian Review of Foreign Affairs*, hal 13- 55.
- [13] Ondreicsak, Robert. 2009. *American Foreign and Security Policy under Barack Obama: change and continuity*. Panorama of global security environment, Bratislava: CENAA, hal 147-162.
- [14] The White House of President Barack Obama. *Statement by President Obama on Nowruz* [online] tersedia di <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/03/18/statement-president-obama-nowruz> [diakses pada 3 Desember 2016].
- [15] Sterio, Milena, 2016. *President Obama's Legacy: The Iran Nuclear Agreement?* [online] tersedia di <http://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2236&context=jil>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2017.
- [16] The Iran Primer, t. t. *The George W. Bush Administration* [online] tersedia di <http://iranprimer.usip.org/resource/george-w-bush-administration>. Diakses pada tanggal 22 April 2017.
- [17] Pujayanti, Adirini. 2013. *Info Singkat Hubungan Internasional – Sanksi Ekonomi Terhadap Iran dan dampak Internasionalnya*, Vol. IV, No. 04/II/P3DI.
- [18] Rahigh, Aghsan dan Peter Viggo, Jakobsen. 2010. "The Rise of Iran: How Durable, How Dangerous?" dalam *The Middle East Journal*, Vol. 64, No. 4, hal 559-573.